

Evaluasi Implementasi SPBE

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

AGUSTUS 2026

Disusun oleh:

Cynthia Devita — Pranata Komputer Pertama

NIP. 199101282025062005



Pengantar SPBE

Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hal tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan perjalanan esensial menuju birokrasi yang lebih modern, transparan, dan responsif.



Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE yang bertujuan untuk mengetahui kondisi implementasi SPBE saat ini pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat serta membandingkannya dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.



Kondisi Saat Ini: Kebijakan, SDM & Infrastruktur SPBE

Kanwil Kalimantan Barat telah memiliki unsur pengelola dan pelaksana SPBE, melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait layanan dan aplikasi yang digunakan maupun dikembangkan di lingkungan kantor wilayah. SOP tersebut menjadi pedoman awal dalam pelaksanaan layanan, penggunaan aplikasi, pembagian tugas, serta penanganan kebutuhan pengguna.

Pengelolaan urusan TIK di tingkat Kantor Wilayah digerakkan oleh Tim TI yang terdiri dari **1 Pranata Komputer Ahli Muda, 4 Pranata Komputer Ahli Pertama, dan 1 Pengolah Data dan Informasi.** Jumlah SDM TIK belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya ruang lingkup pengelolaan SPBE.

Topologi jaringan internet diperbarui dengan **3 Switch Hub** tersebar di 3 lantai, terhubung backbone ke Ruang Server Utama. Optimalisasi pengelolaan server internal ditopang oleh klaster perangkat keras yang terdiri dari tipe server Rackmount serta server tower.

Kondisi Saat Ini: Aplikasi SPBE & Keamanan

Aplikasi Pusat (9 Sistem)

- **AHU Online** — Layanan administrasi hukum umum
- **DGIP** — Pendaftaran kekayaan intelektual
- **Simpeg & Sumaker** — Kepegawaian & surat elektronik
- **SAKTI, SPSE, e-Performance** — Keuangan, pengadaan, kinerja

Inovasi Lokal (5 Sistem)

- **SILANOK** — Pelaporan bulanan notaris Kalbar
- **Cloud Kalbar** — Infrastruktur cloud wilayah
- **Aplikasi Penomoran Surat** — Otomasi naskah dinas
- **Buku Tamu Elektronik** — Pencatatan tamu digital
- **Sikeren** — Sistem kebersihan & keamanan

Keamanan SPBE

- Berdasarkan evaluasi atas anomali siber yang dilaporkan ke Pusdatin, Kantor Wilayah telah menyusun Formulir Manajemen Risiko SPBE secara berkala.
- Aksi nyata penegakan keamanan dilakukan melalui operasi screening terhadap 70 unit perangkat keras pegawai (22 PC, 44 Laptop, 4 Tablet).
- Dari total pengecekan, 68 perangkat dinyatakan bersih (clear) dan 2 perangkat terindikasi berbahaya (infected).
- Perangkat yang terinfeksi langsung ditangani secara represif dengan mematikan Windows Services berbahaya pada startup, menghapus layanan tidak sah atau mencurigakan, serta membersihkan aplikasi bajakan.

Data

Pengelolaan data dan informasi telah dilakukan melalui berbagai aplikasi dan media penyimpanan. Data tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, penyusunan laporan, pengambilan keputusan, dan pemberian layanan kepada pengguna.

Manajemen Aset TIK

Manajemen aset telah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara. Namun, data aset TIK masih tergabung dengan aset non-TIK dan belum tersedia daftar inventaris khusus yang mengelompokkan aset berdasarkan jenis, fungsi, kondisi, lokasi, pengguna, masa manfaat, serta status pemeliharaannya. Kondisi tersebut menyebabkan informasi aset TIK belum dapat disajikan secara cepat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset.



Layanan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat

Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat masih didominasi oleh layanan tatap muka melalui kunjungan langsung masyarakat ke kantor wilayah. Sebagian informasi layanan telah tersedia melalui media digital, tetapi belum seluruhnya tersaji melalui satu kanal yang mudah diakses dan mampu memberikan respons secara cepat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat masih perlu datang langsung untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, kanal layanan, dan tindak lanjut atas layanan yang dibutuhkan.

Gap Analysis

Aspek	Kondisi Saat Ini	Yang Diharapkan	Gap Analysis
Kebijakan	Tim SPBE tersedia, SOP diterbitkan	Tim aktif dengan program kerja & rapat berkala	Koordinasi dan dokumentasi belum optimal
SDM TI	1 Ahli Muda, 4 Ahli Pertama, 1 Pengolah Data	Terpenuhi SDM dari sisi kompeten & jumlah yang sesuai beban kerja	Jumlah dan kompetensi SDM TIK yang tersedia belum sebanding.
Aplikasi	9 aplikasi pusat + 5 inovasi lokal tersedia	Pemanfaatan optimal, terintegrasi, SOP lengkap	Perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan dan penguatan keamanan.
Keamanan	2 perangkat terinfeksi; 78 software tidak berlisensi	Seluruh perangkat aman & berlisensi	Masih ada perangkat yang menggunakan software non-lisensi.
Manajemen Aset	Data aset TIK tergabung dengan aset non-TIK	Inventaris khusus mencakup siklus hidup aset	Belum terdatanya aset TIK secara khusus dan diperbarui berkala
Layanan	Didominasi kunjungan langsung	Maksimalkan layanan digital dengan hotmail chatbot.	Belum tersedia kanal layanan digital yg mampu membetikan informasi secara cepat tanpa kunjungan langsung.



Kesimpulan

Implementasi SPBE di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah berjalan dan didukung oleh pembentukan tim, pemanfaatan aplikasi kementerian, inovasi digital, penguatan infrastruktur, serta pengamanan perangkat TIK. Namun, masih diperlukan penguatan pada penyempurnaan SOP, kecukupan kompetensi SDM TIK, pemantauan dan pencadangan infrastruktur, integrasi aplikasi, standardisasi data dan metadata, serta pendataan aset TIK berbasis siklus hidup. Temuan keamanan berupa perangkat terindikasi berbahaya dan perangkat lunak tidak berlisensi perlu segera ditindaklanjuti. Selain itu, layanan digital perlu diperluas melalui pengembangan Chatbot Agen Kemenkum Kalbar agar akses informasi dan bantuan tidak lagi didominasi kunjungan langsung.

Rekomendasi diarahkan pada delapan prioritas perbaikan

Kebijakan & koordinasi • 0–3 bulan

Sempurnakan SOP; perjelas tugas, program kerja, dan pelaporan Tim Koordinasi SPBE.

Infrastruktur • 0–3 bulan

Dokumentasikan topologi, konfigurasi, dan inventaris; lanjutkan pemeliharaan serta uji pemulihan.

Aplikasi • 0–6 bulan

Tetapkan penanggung jawab, lalu lakukan sosialisasi, pendampingan, pemeliharaan, dan evaluasi.

Data • 3–6 bulan

Susun daftar data, metadata, penanggung jawab, dan mekanisme pemutakhiran berkala.

Keamanan informasi • 0–6 bulan

Tertibkan perangkat lunak tidak berlisensi, perbarui sistem, batasi instalasi, dan lakukan edukasi.

Aset TIK • 0–3 bulan

Verifikasi dan pisahkan inventaris aset TIK bersama pengelola BMN; perbarui secara berkala.

Layanan chatbot • 0–6 bulan

Sempurnakan basis pengetahuan dan eskalasi, kemudian uji dan implementasikan chatbot.

SDM & evaluasi • 3–12 bulan

Petakan kompetensi, usulkan penambahan SDM sesuai kebutuhan, dan pantau tindak lanjut.



Implementasi SPBE yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Terima Kasih